

Evaluasi Implementasi Program Vaksinasi Covid-19 Tahun 2020-2022 Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa

Rafik ^{a,1*}, Marthinus Mandagi ^{b,2}, Sisca Kairupan ^{c,3}

^{1,2,3}Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

¹rafikrafik484@gmail.com, ²marthinusmandagi@unima.ac.id, ³siscakairupan@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:

Evaluation
Implementation
Covid-19 Vaccination
Program

This study aims to describe and interpret the policies of the 2020-2022 Covid 19 Vaccination program in Pineleng District, Kab. Minahasa. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The research locations are the Pineleng District Office and the Pineleng Health Center in the Pineleng District, Minahasa Regency. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of the study show that the implementation of the Covid-19 vaccination policy in Pineleng District has also been optimal, starting from the outreach to the implementation of the vaccine itself. Evaluation of this policy can be seen in the indicators: (1) Effectiveness and efficiency, whereby vaccination is quite effective and efficient in tackling the covid 19 pandemic, (2) Adequacy and equity, the implementation of vaccinations by the government has been carried out evenly. (3) Responsiveness and accuracy, the government has made various policies responsively in coordination with various stakeholders to make this vaccination a success.

INTISARI

Kata kunci:

Evaluasi
Implementasi
Program Vaksinasi
Covid-19

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan kebijakan program Vaksinasi Covid 19 Tahun 2020-2022 di Kecamatan Pineleng, Kab. Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yaitu Kantor Kecamatan Pineleng dan Puskesmas Pineleng yang berada di wilayah Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kebijakan vaksinasi covid-19 di Kecamatan Pineleng juga sudah optimal mulai dari sosialisasi sampai dengan pelaksanaan vaksin itu sendiri. Evaluasi kebijakan ini dapat dilihat pada indikator : (1) Efektivitas dan efisiensi, dimana dengan adanya vaksinasi cukup efektif dan efisien dalam menanggulangi pandemic covid 19, (2) Kecukupan dan pemerataan, pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah telah dilaksanakan secara merata. (3) Responsivitas dan ketepatan, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dengan tanggap dengan berkoordinasi dengan berbagai stakeholder untuk mensukseskan vaksinasi ini.

Diterima : 21-06-2023

Dipublish : 30-06-2023

Copyright © 2023 (Rafik). All Right Reserved

1. Pendahuluan

* Korespondensi Penulis; rafikrafik484@gmail.com

Pada awal tahun 2020 merupakan kali pertama corona virus atau dalam bahasa medis Corona Virus Disease (Covid 19) terdeteksi di

Indonesia, dan menyebar keseluruh negeri yang sulit dihentikan penyeberannya. Covid 19 pada akhirnya menjadi penyakit yang begitu fenomena karena mengancam nyawa bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia.

Virus ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, China medio Desember 2019. Penyakit yang disebabkan virus ini menyerang saluran pernafasan. Januari tahun 2020 pertama kali teridentifikasi sebagai varian novel coronavirus yang kemudian diberi kode 2019-nCoV. Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization) kemudian memberikan nama resmi pada virus ini sebagai COVID-19.

Penyakit ini menyebar dengan sangat cepat di seantero bumi, sehingga menyita perhatian seluruh dunia. Virus ini menyerang secara global dan menjadi pandemi berbahaya di abad modern ini. Dari data WHO atau World Health Organization telah terjadi penurunan drastis terhadap kemunculan kasus covid di Negara-negara, dan sebagian besarnya bahkan melaporkan tak ada kasus dalam selang tahun 2022.

Menurut rilis WHO pada halaman resminya tanggal 16 Maret 2023, total kasus covid 19 di seluruh dunia sebesar 760.360.956 yang terkonfirmasi. Dimana 6.873.477 diantaranya dinyatakan meninggal. Dalam laporan terakhir WHO sebagaimana dikutip dari website resminya, bahwa pada 13 Maret 2023 kasus terkonfirmasi adalah 220.121 dengan kematian pada angka 897 jiwa .

Virus ini menyebar dengan cepat dan penanganan yang lambat dapat berakibat pada kematian. Di Indonesia, pemerintah pun harus menetapkan wabah virus ini sebagai sebuah bencana nasional sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden No. 24/2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Keppres ini ditandatangani Presiden RI Joko Widodo pada 31 Desember 2021 di Jakarta.

Dari data Kementerian Kesehatan RI terhadap sebaran Covid 19 di Indonesia terupdate tanggal 16 Maret 2023, jumlah kasus yang terkonfirmasi sejumlah 6.740.404 dengan kasus sembuh 6.575.775 dan dinyatakan meninggal berjumlah 160.963 jiwa. Dimana terdapat kasus aktif sebesar 3.666 yang dalam penanganan pihak kesehatan.

Pandemi ini telah mengganggu stabilitas nasional yang tengah gencar melaksanakan pembangunan nasional dalam membangun perekonomian negara, dan harus digeser untuk penanganan pandemi Covid 19 dan dampak-dampak yang mengikutinya [1]. Penanganan pandemi ini menjadi tantangan pemerintah karena terdampaknya wabah virus hampir di seluruh daerah, sehingga butuh perhatian serius dan sinergitas pemerintah di segala lini untuk menangannya.

Provinsi Sulawesi Utara juga merupakan

salah satu daerah terdampak penyakit virus COVID 19 selain daerah lain di Indonesia. Pertama kali terdeteksi di daerah ini pada 14 Maret 2020 dan hingga update terakhir data Covid 19 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per 7 Maret 2023 adalah berjumlah 54.400 dimana terkonfirmasi sembuh 53.140 kasus dengan angka kematian sebesar 1.260 jiwa.

Pemerintah Sulawesi Utara dalam upayanya menangani pandemic ini, menjalankan kebijakan sesuai arahan pemerintah pusat dalam rangka menurunkan angka kematian dan menurunkan transmisi atau penularan Covid 19 dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 20/2020 tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran (OPP) Covid 19 di Provinsi Sulawesi Utara yang tujuannya adalah melakukan pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat dalam menekan dan mengantisipasi peningkatan eskalasi penyebaran virus [2].

Kebijakan diatas dilaksanakan oleh seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, dimana ada Kabupaten Minahasa didalamnya. Data kasus Covid di Kabupaten Minahasa per tanggal 18 Maret 2023 berdasarkan update data terakhir medio September 2022 adalah berjumlah 6.326 kasus dengan angka kematian 198 jiwa.

Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9/2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dimana didalamnya dicanangkan gerakan vaksinasi masal kepada seluruh masyarakat Indonesia. Vaksinasi ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi pandemic. Vaksinasi ini ternyata terbukti tidak hanya terkait upaya meningkatkan imun tubuh manusia tapi secara medis memberikan perlindungan ekstra saat terpapar Covid-19 [3].

Program vaksinasi Covid 19 di Indonesia mulai dilakukan pada 13 Januari 2021, dimulai dengan gelombang pertama yang diberikan kepada tenaga-tenaga kesehatan, para petugas public, dan lansia. Target pemerintah, medio Maret 2022 diharapkan masyarakat yang sudah divaksin dapat mencapai 181,5 juta jiwa (Kemenkes RI, 2021). Adapun jenis vaksin yang digunakan dalam pemenuhan target tersebut adalah Moderna, Pfizer, AstraZaneca, Sinopharm, dan Sinovac (Kemenkes RI, 2021).

Kecamatan Pineleng di Kabupaten Minahasa adalah salah satu kecamatan yang terdampak pandemic Covid-19. Kecamatan Pineleng menjadi kecamatan di Kabupaten Minahasa dengan konfirmasi kasus Covid 19 terbanyak. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa per 10 Juni 2021 mencatatkan jumlah kasus 311, dengan angka kematian 11 jiwa. Data ini merupakan yang tertinggi di Kabupaten Minahasa.

Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Pemerintah Kecamatan Pineleng dan Puskesmas Pineleng melaksanakan vaksinasi dalam menurunkan angka terjangkitnya virus. Dengan

beragam strategi dilakukan agar warga dapat terlayani vaksin.

Untuk menurunkan laju persebaran virus, selain dengan melaksanakan protocol kesehatan maka dilaksanakan program vaksin dengan membuka posko-posko vaksinasi di tiap desa di Kecamatan Pineleng. Hal mana para petugas kesehatan bergantian mengunjungi tiap posko di desa-desa. Pun dari pihak Polri dan TNI turut terlibat dalam kegiatan-kegiatan vaksinasi, baik dengan membuka poskonya sendiri di instansinya maupun bersama Pemerintah Kecamatan Pineleng di tiap-tiap kegiatan vaksinasi.

Kegiatan vaksinasi Covid 19 juga diadakan oleh Pemerintah bekerjasama dengan pihak gereja dan masjid, dimana para pemuka agama turut serta menganjurkan kepada jamaahnya untuk melaksanakan vaksinasi agar terjaga dari serangan virus.

Upaya tersebut berjalan cukup efektif mendorong vaksinasi terlaksana dengan cepat dan massif. Dari jumlah penduduk Kecamatan Pineleng Tahun 2022 sejumlah 18.638 jiwa, per bulan februari 2022 yang belum di vaksin tersisa kurang lebih 4.000 jiwa sejak pertama kali vaksinasi dilaksanakan serentak se-Indonesia pada Januari 2021.

Camat Pineleng, Kabupaten Minahasa mengatakan capaian ini boleh dikatakan cukup berhasil dan lancar hasil kerja keras pemerintah berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait serta kesadaran masyarakat meski dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala. Kendala terberat dihadapi adalah munculnya anggapan masyarakat mengenai tingkat keamanan vaksin. Hal ini dipersulit dengan munculnya isu-isu dikalangan masyarakat bahwa vaksin mengandung zat tidak halal yang menyebabkan penolakan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Pineleng dan Puskesmas Pineleng terus gencar melakukan program vaksin sesuai tahapan yang dianjurkan pemerintah pusat. Dan hingga saat ini seluruh warga tercatat telah melaksanakan vaksin meski dari beberapa kalangan belum secara lengkap di vaksin dalam 4 (empat) tahapan sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penting dilaksanakannya evaluasi atas kebijakan vaksinasi Covid 19 tahun 2020-2022 di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Oleh karena itu, penulis menarik kesimpulan untuk mengadakan penelitian guna menganalisa dan mengevaluasi yang kemudian dikembangkan dalam sebuah penelitian dengan judul : Evaluasi Kebijakan Vaksinasi Covid 19 di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa

Yang menjadi focus masalah pada penelitian ini adalah evaluasi implementasi pogram vaksinasi Covid-19 Tahun 2020 – 2022 pada masyarakat di

Kecamatan Pineleng, Kab. Minahasa.

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka diambilah perumusan yaitu: (1) Bagaimana evaluasi implementasi pogram vaksinasi covid 19 tahun 2020 di kecamatan Pineleng kabupaten Minahasa, (2) Bagaimana evaluasi implementasi pogram vaksinasi kovid 19 tahun 2021 di kecamatan Pineleng kabupaten Minahasa, (3) Bagaimana evaluasi implementasi pogram vaksinasi kovid 19 tahun 2022 di kecamatan Pineleng kabupaten Minahasa.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan kebijakanpogram Vaksinasi Covid 19 Tahun 2020-2022 di Kecamatan Pineleng, Kab. Minahasa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin memperoleh gambaran yang bersifat komprehensif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dengan harapan bahwa data dan informasi yang dideskripsikan sesuai kenyataan di lapangan dan disajikan dalam bentuk kata atau kalimat dapat menghasilkan suatu kesimpulan [4].

Adapun penelitian ini menggunakan desain studi kasus, yaitu peneliti ingin melihat gambaran secara menyeluruh mengenai penanganan Covid 19 di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Studi kasus merupakan uraian dan penjelasan komprehensif baik dari aspek individu, kelompok, organisasi, program atau status social [5].

Lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian yaitu Kantor Kecamatan Pineleng dan Puskesmas Pineleng yang berada di wilayah Kecamatan Pineleng, Kabupaten , Minahasa dan pengujian.

Yang menjadi focus penelitian adalah:

1. mengevaluasi implementasi pogram vaksinasi Covid-19 tahun 2020 di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.
2. mengevaluasi implementasi pogram vaksinasi Covid-19 tahun 2021 di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.
3. mengevaluasi implementasi pogram vaksinasi Covid-19 tahun 2022 di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.

Data dan Sumber Data :

1. Data
Secara konkrit data penelitian pada penelitian kualitatif adalah menjelaskan objek penelitian yang menjadi focus dan lokus suatu penelitian atau dengan kata lainnya yaitu sesuatu yang menjadi sasaran dalam penelitian.
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data berupa Sumber data primer dan Sumber data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas [6]. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan dan analisis data adalah Reduksi Data, Display Data dan Verifikasi Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability [7]. Hal mana harus dilakukan uji keabsahan data agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, yaitu dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar data asli.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada tanggal 3 September 2020, Presiden Republik Indonesia membentuk suatu tim percepatan dalam pengembangan vaksin Covid-19. Melalui Keppres No. 18/2020 ditetapkan tim nasional ini dibawah koordinasi dan pengawasan Menko Bidang Perekonomian, dimana Kementerian Riset Teknologi mendapat tanggung jawab dalam melaporkan secara harian kepada Presiden.

Tanggal 6 Oktober 2020, Presiden mengeluarkan Perpres (Peraturan Presiden) mengenai pengadaan vaksin serta pelaksanaan program vaksinasi dalam penanggulangan pandemic. Dalam Perpres ini ditetapkan bahwa pemerintah akan mempersiapkan pengadaan serta pendistribusian dan pelaksanaan vaksinasi. PT. BIO FARMA, yang merupakan perusahaan Negara ditugaskan untuk menyediakan vaksin dengan melakukan kerja sama dengan berbagai organisasi internasional. Dalam perpres itu juga dijelaskan bahwa Kementerian ditugaskan melakukan pengaturan jalannya distribusi dan sebagai pelaksana vaksinasi nasional.

Sebelumnya, pada tanggal 16 September 2020 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta UNICEF melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka memastikan penyediaan vaksin dengan harga terjangkau. Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bagian komitmen Pemerintah Indonesia terhadap COVAX (Akselerator Akses ke Peralatan COVID-19) atau ACT-Accelerator di bawah tanggungjawab Gavi dan WHO hal mana bertujuan menjamin kelancaran dalam pengadaan dan pemerataan distribusi vaksin COVID-19 ke semua negara.[8]

Pemerintah Indonesia menerimasekitar 30 juta dosis vaksin pada akhir tahun 2020 melalui perjanjian bilateral dengan berbagai produsen vaksin serta tambahan 50 juta dosis pada awal tahun 2021. Saat vaksin yang aman tersedia, Pemerintah Indonesia kemudian melaksanakan

vaksinasi sebagaimana diamanatkan Perpres yang dikeluarkan pada awal bulan Oktober.

Perpres ini menjadi acuan dalam pelaksanaan penanggulangan Covid -19 di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara. Dan sebagaimana dalam pelaksanaan vaksinasi ini juga dilaksanakan di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.

Dari data yang diperoleh dari Puskesmas Pineleng bahwa tercatat bahwa yang terkonfirmasi Covid-19 adalah berjumlah 764 kasus. Dimana pada tahun 2020 sejumlah 212 kasus, tahun 2021 sejumlah 231 kasus, dan pada tahun 2022 sejumlah 321 kasus.

Data Jumlah Kasus Covid-19 Di Kecamatan Pineleng, Kab. Minahasa Tahun 2020-2022			
Tahun	2020	2021	2022
Jumlah Kasus	212	231	321
JUMLAH KESELURUHAN			764

Adapun pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa dilaksanakan dengan 3 (tiga) Cakupan, cakupan vaksinasi terdiri dari pelaksanaan vaksin dengan 4 (empat) dosis. Pada tiap cakupan ini menasar masyarakat dengan sasaran masyarakat produktif dengan tidak menasar balita dan lansia. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Pineleng berjumlah 27.944 jiwa pada tahun 2022.

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Winangun Atas	569	596	1.165
2	Lota	550	629	1.179
3	Kali	871	786	1.657
4	Kali Selatan	854	801	1.655
5	Pineleng Satu	1.527	1.467	2.994
6	Pineleng Dua	1611	1.178	2.789
7	Pineleng Dua Indah	384	391	775
8	Pineleng Satu Timur	317	303	620
9	Warembungan	2.269	2.149	4.418
10	Sea	2.751	2.678	5.429
11	Sea Satu	1.009	946	1.955
12	Sea Dua	596	672	1.268
13	Sea Mitra	489	455	944
14	Sea Tumpengan	550	546	1.096
JUMLAH JIWA		14.347	13.597	27.944

1.1 Cakupan Pelaksanaan Vaksinasi

1) Cakupan Vaksinasi Pertama

Menurut data Puskesmas Pineleng, cakupan pertama dilaksanakan pada tahun 2021 dengan menasar masyarakat Kecamatan Pineleng dengan estimasi berjumlah 23.540 jiwa yang merujuk pula

pada jumlah dosis vaksin yang tersedia. Dengan 4 kali dosis yang dilaksanakan telah berhasil melakukan vaksin kepada masyarakat dengan jumlah 14.699 jiwa.

Pada cakupan ini, telah tervaksin sekitar 62,32 % masyarakat yang wajib vaksin dengan kriteria yang memenuhi syarat. Pada cakupan pertama ini, jenis vaksin yang digunakan adalah Sinovac (3789 dosis), Sino Anak (369 dosis), Aztrazanece (8272 dosis), Moderna (328 dosis), dan Pfizer (1951 dosis).

2) Cakupan Vaksinasi Kedua

Pada cakupan yang kedua, yaitu pada tahun 2022 telah tervaksin sekitar 30,11 %, yaitu sejumlah masyarakat yang divaksin adalah 7088 jiwa.

Jenis vaksin yang digunakan adalah Sinovac (616 dosis), Sino Anak (2345 dosis), Aztrazanece (1204 dosis), Moderna (662 dosis), dan Pfizer (1886 dosis), serta Covovax (371 dosis).

3) Cakupan Vaksinasi Ketiga

Pada cakupan yang kedua, yaitu pada tahun 2023 telah tervaksin sekitar 1,98 %, yaitu sejumlah masyarakat yang divaksin adalah 465 jiwa.

Jenis vaksin yang digunakan adalah Indovac (22 dosis), Pfizer (163 dosis), serta vaksin untuk lansia (280 dosis).

Data – data tersebut merupakan data jumlah pelaksanaan vaksinasi di Kecamatan Pineleng merujuk data dari Puskesmas Pineleng tertanggal 02 Maret 2023.

Estimasi jumlah penduduk yang memenuhi syarat divaksin oleh pemerintah sejumlah 23.540 jiwa maka sampai dengan tanggal 02 Maret 2023 telah dilakukan vaksin terhadap penduduk di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa sejumlah 21.923 jiwa.

Jumlah diatas berada pada kisaran 93,13 % penduduk yang divaksin sesuai dengan estimasi penduduk memenuhi syarat. Dan berada pada kisaran 78,5 % penduduk yang divaksin jika merujuk pada jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Pineleng sejumlah 27.944 jiwa.

Tidak tercapainya target vaksin/dosis dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang imunitas tubuh/kekebalan tubuh yang akan diperoleh dari vaksinasi, serta belum terbentuknya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya program vaksinasi. Tetapi jika merujuk angka diatas, program vaksin boleh dikatakan cukup berhasil karena telah melebihi 90 % penggunaan ketersediaan vaksin yaitu sekitar 21.923 dosis dari target estimasi 23.540 dosis yang disediakan.

1.2 Analisis Kebijakan Vaksin

Dari penelitian di Kantor Kecamatan Pineleng dan Puskesmas Pineleng, proses vaksinasi boleh disimpulkan berjalan dengan lancar meski pada awalnya pemerintah harus melakukan sosialisasi membentuk pemahaman masyarakat akan persepsi

dan kekhawatiran public masyarakat terkait vaksinasi Covid 19 di Kecamatan Pineleng.

Maka oleh karena itu, dapat saya jelaskan dibawah ini hasil penelitian dengan merujuk pada wawancara dengan informan terkait Evaluasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.

1) Efektifitas dan Efisiensi

Hasil wawancara kepada para informan tentang indikator efektivitas maka dapat diketahui bahwa dengan adanya vaksinasi cukup efektif dalam menanggulangi pandemi covid-19 tetapi tidak terlepas dari tetap memperhatikan Protokol kesehatan 5 M. Dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini juga memunculkan tanggapan masyarakat, ada yang setuju tapi adapula yang tidak setuju. Tetapi ada juga yang secara sukarela untuk di vaksin. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang mendorong keberhasilan program vaksinasi yaitu dukungan dan partisipasi masyarakat. [9]

Berdasarkan pada hasil-hasil dokumentasi maka dapat diketahui bahwa pemerintah Kecamatan Pineleng berkolaborasi dengan Puskesmas Pineleng dan instansi lainnya seperti TNI /POLRI terkait dalam pelaksanaan kebijakan sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, hal ini dalam rangka mendukung efektivitas dari kebijakan tersebut, pemerintah mempermudah masyarakat dalam mengakses tempat sentra vaksin dengan melalui system dan juga berkolaborasi dengan pihak swasta untuk bekerjasama dalam mengadakan pelayanan vaksinasi bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka hasil analisisnya adalah Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia dimulai pada tanggal 13 Januari 2021. Untuk gelombang pertama, vaksin tersebut diberikan ke tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Pada gelombang kedua, sasaran vaksinasi adalah masyarakat kelompok rentan dan masyarakat umum lainnya. WHO memaparkan bahwa kinerja vaksin dapat dilihat dari tiga pengukuran yaitu melalui efikasi, efektivitas, dan dampak vaksin (*World Health Organization, 2021*). Efikasi vaksin mengukur penurunan risiko infeksi yang terjadi pada individu yang divaksin dalam situasi terkontrol. Data efikasi ini diperoleh dari uji klinis secara acak (randomized control trial). Sedangkan efektivitas vaksin mengukur pengurangan risiko infeksi yang terjadi pada individu yang divaksin terkait dengan pelaksanaan vaksinasi di masyarakat atau dalam dunia nyata dengan menggunakan studi observasional. Selanjutnya dampak vaksin adalah pengurangan risiko infeksi atau penyakit pada populasi yang sebagian masyarakatnya sudah divaksin.[10]

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan tentang indikator Efisiensi maka dapat diketahui bahwa dalam membuat kebijakan vaksinasi covid-19 ini berhasil. Pihak Pemerintah

Kecamatan dan Pihak Puskesmas Pineleng terus mengupayakan kerjasama antar pemerintah maupun swasta, yang mana didukung oleh semangat kolaborasi antar pihak pada akhirnya membangun atau menjalin kerjasama-kerjasama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Adanya 3 Pilar yang menjadi stakeholder penggerak diantaranya Pemda, TNI, POLRI sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan yaitu pelaksanaan vaksinasi yang lancer, aman dan bermanfaat. Dari waktu pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, Kementerian Kesehatan memperkirakan bahwa proses vaksinasi akan berlangsung selama 15 bulan, mulai dari bulan Januari 2021 sampai bulan Maret 2022. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka hasil analisisnya adalah Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia dimulai pada tanggal 13 Januari 2021. Untuk gelombang pertama, vaksin tersebut diberikan ke tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Pada gelombang kedua, sasaran vaksinasi adalah masyarakat kelompok rentan dan masyarakat umum lainnya.

2) Kecukupan dan Pemerataan

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dapat dikatakan bahwa pemerintah kecamatan memang mengupayakan secara maksimal dalam mensukseskan kebijakan vaksinasi covid-19, selain itu juga memiliki semangat kolaborasi dimana pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak dalam menggandeng semua pihak yang ingin bahu membahu menanggulangi pandemic waktu itu. Pemerintah kecamatan juga menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, hal ini untuk mendukung efektivitas dari kebijakan tersebut, pemerintah mempermudah masyarakat dalam mengakses tempat sentra vaksin dengan melalui system dan juga berkolaborasi dengan pihak swasta untuk bekerjasama dalam mengadakan pelayanan vaksinasi bagi masyarakat.

Pemerataan merupakan hal yang berkaitan dengan manfaat pendistribusian secara merata kepada masyarakat. Indikator yang diambil adalah apakah telah meratanya pelaksanaan kebijakan ini di tengah masyarakat. Maka dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, pelaksanaan vaksin oleh pemerintah dilaksanakan secara merata. Dan sesuai instruksi Pemerintah Pusat bahwa vaksinasi harus dilakukan secara menyeluruh sehingga oleh pemerintah setempat melaksanakan instruksi tersebut dengan dukungan masyarakat juga. Berdasarkan wawancara-wawancara diatas, dapat diambil analisis bahwa kebijakan vaksin covid19 oleh pemerintah diberlakukan oleh setiap daerah tak terkecuali oleh Pemerintah Kecamatan Pineleng dan pihak kesehatan dalam hal ini Puskesmas Pineleng. Pemerintah kecamatan dan Puskesmas telah melaksanakan kebijakan ini secara merata serta dengan keseriusan karena dampak covid19 waktu itu telah melumpuhkan

segala aktivitas masyarakat. Sosialisasi yang terus dilakukan pada waktu itu telah membawa dampak positif dimana vaksinasi hamper 100% di Kecamatan Pineleng pada saat ini. Adanya strategi wajib vaksin dalam pelayanan administrasi masyarakat sangat berperan besar mempercepat pelaksanaan vaksin bagi semua masyarakat di Pineloeng. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka hasil analisisnya adalah kebijakan vaksinasi covid-19 yang dibuat oleh pemerintah pusat dan di berlakukan oleh setiap daerah memiliki cara dalam mensukseskan kebijakan itu masing-masing, seperti di DKI Jakarta yang berusaha untuk meratakan program vaksinasi kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta tanpa memandang status apapun, semua masyarakat dapat mengakses dan mendapatkan vaksin pemerintah, kemudian sosialisasi terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mempercepat kebijakan ini tercapai 100%, kemudian strategi membuat vaksin sebagai syarat pelayanan publik merupakan salah satu cara atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat kebijakan vaksinasi covid-19 tercapai.

3) Responsifitas dan Ketepatan

Responsifitas dapat dikatakan juga sebagai bentuk kepekaan atau dalam hal ini bagaimana tindakan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan. Salah satu bentuk responsibilitas adalah kemampuan untuk membuat kebijakan pelaksanaan kegiatan. Responsif disini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana hasil dari kebijakan itu sendiri. Dari hasil wawancara dapat di ketahui bagaimana respon pemerintah dalam menangani wabah. Dengan adanya program vaksin yang dari pemerintah pusat dapat dibuktikan saat ini bahwa dapat berjalan lancer. Meski awalnya mendapat tantangan apalagi dari munculnya isu-isu negative mengenai dampak vaksinasi ini tapi kesadaran masyarakat telah memperkuat pelaksanaan vaksinasi ini dapat berjalan baik. Pemerintah juga boleh dikatakan cukup tanggap dalam menghadapi permasalahan ini. Pemerintah Daerah didukung TNI dan POLRI secara masih turun ke lapangan mensukseskan vaksinasi ini. Dengan didukung pula oleh Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 20/2020 tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran (OPP) Covid 19 di Provinsi Sulawesi Utara yang tujuannya adalah melakukan pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat dalam menekan dan mengantisipasi peningkatan eskalasi penyebaran virus, telah membuat pelaksanaan pelaksanaan vaksinasi berjalan sesuai dengan rencana pemerintah [2]. Kebijakan pemerintah dengan diturunkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9/2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dimana didalamnya dicanangkan gerakan vaksinasi masal

kepada seluruh masyarakat Indonesia, telah menjadi salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi pandemic. Vaksinasi ini ternyata terbukti tidak hanya terkait upaya meningkatkan imun tubuh manusia tapi secara medis memberikan perlindungan ekstra saat terpapar Covid-19 [3].

Ketepatan disini berkaitan dengan hasil tujuan dari kebijakan ini, apakah telah terlaksana sesuai keinginan yang benar-benar ingin dicapai serta memberi manfaat kepada masyarakat.

Dari wawancara dengan informan dengan indicator ketepatan dapat di ambil pernyataan bahwa, kebijakan vaksinasi ini merupakan kebijakan tepat dan positif. Namun ada juga masyarakat yang mengeluhkan mengenai kebijakan vaksin 2 kali dosis pada akhirnya dilaksanakan lebih dari 3 kali.

Dari observasi dengan indicator ketepatan ini, jelas kebijakan ini sangat tepat. Terutama pemerintah turun langsung ke lapangan memastikan percepatan program ini. Hal ini dibuktikan saat ini yang mana wabah dapat berakhir.

4. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan vaksinasi covid-19 di Kecamatan Pineleng juga sudah optimal mulai dari sosialisasi sampai dengan pelaksanaan vaksin itu sendiri, hal ini dibuktikan dengan saat wabah dapat berakhir.

Evaluasi kebijakan ini dapat dilihat pada indikator : (1) Efektivitas dan efisiensi, dimana dengan adanya vaksinasi cukup efektif dan efisien dalam menanggulangi pandemic covid 19, (2) Kecukupan dan pemerataan, pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah telah dilaksanakan secara merata. (3) Responsivitas dan ketepatan, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dengan tanggap dengan berkoordinasi dengan berbagai stakeholder untuk mensukseskan vaksinasi ini.

Referensi

- [1] V. Fernández-Pérez and A. Peña-García, "The Contribution of Peripheral Large Scientific Infrastructures to Sustainable Development from a Global and Territorial Perspective: The Case of IFMIF-DONES," *Sustainability*, vol. 13, no. 2, 2021.
- [2] *Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran (OPP) Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara*. Sulawesi Utara, 2020.
- [3] Menteri Kesehatan RI, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Republik Indonesia, 2020.
- [4] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian*

Kualitatif, Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

- [5] D. Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja, 2008.
- [6] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- [7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- [8] A. E. Puteri, E. Yuliarti, A. A. Fauzia, Y. S. Wicaksono, and N. Tresiana, "ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA," *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)*, vol. 19, no. 1, 2022.
- [9] L. Fitrianingrum, "Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat," *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, vol. 6, no. 1, Oct. 2021, Accessed: Jun. 27, 2023. [Online]. Available: <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/14715>
- [10] F. Utami, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA BATAM DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI," *Jurnal Administrasi Negara*, vol. 20, no. 1, 2022.



© 2023 by the authors. Licensee Administro Journal

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).